

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Program

Program didefinisikan sebagai sebuah kesatuan kegiatan yang diimplementasikan dari suatu kebijakan dan pelaksanaannya sedang berjalan dan berkesinambungan di sebuah organisasi yang melibatkan sejumlah orang atau kelompok. (Suryadin, Sari, and Nurfitriani 2022) Arikunto berpendapat jika program didefinisikan dipersempit dengan makna kegiatan yang direncanakan maka saat program telah selesai di laksanakan tidak dikategorikan sebagai program lagi. (Arikunto and Jabar 2018)

Eko Putro Widoyoko berpendapat sedikit berbeda yang menyatakan bahwa program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan sedemikian rupa dan dilaksanakan secara berkesinambungan yang diterapkan di sebuah organisasi dengan melibatkan banyak orang. (Widoyoko 2017)

Pandangan lain oleh Weaver tentang definisi program ialah sekumpulan proyek yang saling terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan proyek yang direncanakan. Koordinasi menjadi salah satu unsur utama yang krusial dalam pelaksanaan program. Program dilaksanakan untuk merealisasikan kebijakan yang telah diputuskan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. (Daryono, Hardhienata, and Retnowati 2023)

Berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa definisi program ialah sekumpulan kegiatan yang saling keterkaitan direncanakan untuk merealisasikan sebuah kebijakan dengan melibatkan banyak orang atau kelompok.

B. Definisi Evaluasi Program

Secara etimologi kata evaluasi memiliki persamaan makna dengan kata dalam bahasa inggris "*evaluation*" yang diartikan pengukuran atau penilaian. (Cutris. et al. 1996). Terdapat 2 istilah lain dalam bahasa inggris yang memaknai kata evaluasi yaitu: "*measurement*" yang memiliki arti pengukuran, dimana dimaksudkan sebagai perbandingan sesuatu dengan satuan ukuran yang telah ditentukan. "*evaluation*" yang artinya penilaian, dimana dimaksudkan

membuat keputusan dengan memberikan penilaian baik atau buruknya sesuatu. (Trimudrika. and Yahiji 2023)

Nurkencana berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses menilai suatu hal. (Widodo and Sahertian 2018). Rifa'i dalam bukunya menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses sistematis dan teratur yang membandingkan hasil dengan tolok ukur tertentu dan memberikan rekomendasi pada setiap langkah pelaksanaan program. (Rifa'i 2019, 11)

Sedangkan menurut Raka Joni evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan mempertimbangkan sebuah nilai (*Value Judgment.*) suatu barang, jasa, atau program dengan meninjau berbagai aspek yang berkaitan. (Mayasari 2021)

Menurut Chabib Thoha (Idrus 2019) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan membandingkannya pada sejumlah instrumen dan menyimpulkan hasilnya.

Kata evaluasi jika di hubungkan dengan kata program menurut Arikunto dan Jabar dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya penilaian implementasi sebuah kebijakan yang dilakukan secara akurat dengan menelusuri setiap keefektifan setiap masing-masing komponen dari sebuah program yang akan dievaluasi. (Arikunto and Jabar 2018)

Stark dan Thomas juga memberikan penjelasan tentang evaluasi yang lebih spesifikasi pada evaluasi program, "*Evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, setting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives.*" (Stark and Tomas 1992) yang artinya bahwa "Evaluasi adalah proses memastikan keputusan yang menjadi perhatian, menetapkan informasi yang tepat, dan mengumpulkan serta menganalisis informasi untuk melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih diantara alternatif-alternatif.

Sesuai dengan uraian di atas, sudut pandang lain menggambarkan evaluasi sebagai suatu kegiatan penilaian terencana dengan proses pelaksanaan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar memperoleh data yang

cukup untuk dijadikan landasan dalam mengambil penilaian terhadap keberlanjutan program.(Ananda 2017).

Menurut T. Morisson dalam buku Slamet yang berjudul “evaluasi pendidikan”, menjelaskan bahwa program yang dievaluasi minimal memenuhi 3 komponen diantaranya ialah: deskripsi program yang akan dievaluasi, kriteria program seharusnya, *judgement/* pertimbangan program setelah dilakukan evaluasi.(Slameto 2001) Kegiatan evaluasi direncanakan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait yang akan dinilai dimaknai dengan deskripsi. Kemudian informasi yang dicari memiliki ketentuan kriteria tertentu dan menjadi bahan *judgement*. Berdasarkan 3 komponen minimal yang harus ada di proses evaluasi program.

Evaluasi program tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa persiapan yang jelas, melainkan harus menggunakan metode dan strategi yang dapat diterima. Sehingga hasil evaluasi program dapat memberikan masukan, kritik, saran, dan informasi untuk memutuskan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, ditingkatkan, atau diakhiri. (Munthe 2015)

Suharsimi Arikunto memberikan 4 macam kebijakan yang dapat diterapkan setelah melakukan evaluasi program, diantaranya ialah:

- a. Program yang dievaluasi dapat dilanjutkan, karena berdasarkan data yang terkumpul saat evaluasi menunjukkan program ini memiliki manfaat dan terlaksana secara maksimal tanpa ada hambatan. Kualitas pencapaian tujuan program ini juga dinilai sangat tinggi.
- b. Program yang dievaluasi dapat dilanjutkan dengan perbaikan. Karena berdasarkan data yang diperoleh saat evaluasi menggambarkan manfaat dari program, namun terdapat beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaannya sehingga kurang efektif mencapai tujuan, sehingga perlu memperhatikan dan dipertimbangkan Kembali.
- c. Program tersebut perlu dimodifikasi, karena berdasarkan hasil evaluasi program ini bernilai manfaat namun kurang mencapai tujuan. Program ini perlu direncanakan ulang secara lebih baik lagi, dalam hal ini mungkin dapat merubah tujuan program.

- d. Program yang dievaluasi tidak dapat dilanjutkan (dihentikan pelaksanaannya) dikarenakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini tidak memiliki manfaat, tidak mencapai tujuan dan mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. (Suryadi, Sari, and Nurfitriani 2022)

Selain kata evaluasi didefinisikan oleh para ahli, istilah kata evaluasi juga terdapat dalam Alquran diantaranya kata “*Tabayyunu*” yang memiliki artinya periksalah. (Baqi 1939). Kata “*Tabayyunu*” terdapat pada Alquran Surah Al-Hujurat ayat 6 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُلْمِينَ ﴿٦﴾﴾ [الحجرات: 6]

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat diatas ditafsirkan dalam buku tafsir Jalalain dengan penjelasan sebagai berikut: (Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita) (maka periksalah oleh kalian) kebenaran beritanya itu, apakah ia benar atau berdusta. Menurut suatu qiraat dibaca Fatatsabbatuu berasal dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum) menjadi Maf’ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum (tanpa mengetahui keadaannya) menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari Fa’il, yakni tanpa sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut (menyesal) selanjutnya Rasulullah ﷺ mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ (Al-Mahalli)

Tafsir dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada Nabi muhammad untuk meneliti terlebih dahulu kebenaran dari sebuah berita agar tidak menjadi bala petaka dikemudian hari, jika dikaitkan dengan evaluasi memiliki tujuan yang sama untuk mencari tahu kesesuaian pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan dan dalam bentuk ketelitian agar tidak menjadi kerugian pada masa mendatang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan definisi evaluasi ialah sebuah kegiatan terencana untuk menilai suatu hal yang dilakukan secara sistematis dan hasil penilaian berupa data atau informasi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk keberlangsungan suatu program.

C. Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi pada umumnya memiliki tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai kritik, saran dan pertimbangan sebagai bahan kontribusi pembuatan kebijakan menyangkut desain, administrasi, keefektifan dan efisiensi program yang dievaluasi. (Mutrofin 2014)

Menurut Purwanto dan Suparman tujuan evaluasi program diurutkan menjadi 4 poin, diantaranya ialah:

1. Menginfokan program kepada masyarakat atau orang yang terkait. Hasil evaluasi program yang dilakukan akan menjadi bahan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum tentang program yang dievaluasi, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah program yang dijalankan.
2. Memberikan bahan pengambilan keputusan bagi pemimpin/ manajer. Seorang manajer atau pemimpin sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan sebuah program sangat membutuhkan hasil evaluasi program untuk menilai keputusan yang bagaimana perlu diambil kedepannya.

3. Menyempurnakan program yang berjalan. Evaluasi program yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan alternatif solusi lebih efektif untuk penyempurnaan program.
4. Meningkatkan partisipasi dan perkembangan program. Hasil evaluasi program yang didapatkan setelah melakukan berbagai tahap analisis, secara tidak langsung memberikan dampak kepada partisipasi masyarakat dalam hal berupaya mendukung pelaksanaan atau pertumbuhan program.(Ananda 2017)

Stufflebeam (Carifio 2012) memiliki pendapat yang hampir sama bahwa tujuan evaluasi program untuk memperoleh informasi yang akan diberikan evaluator untuk membuat keputusan oleh pemimpin terhadap keberlangsungan program. Meskipun evaluator adalah penyedia informasi tapi tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan suatu program.

Pendapat yang sedikit berbeda dari Greene (Amin 2014) yang menyatakan tujuan evaluasi program ialah untuk menilai lebih lanjut tentang keefektifan program yang sedang berlangsung. Berdasarkan pendapat lain evaluasi program juga memiliki tujuan sebagai *feedback* terhadap kegiatan dalam program yang dievaluasi. (Trimudrika. and Yahiji 2023)

Selanjutnya Scriven menyatakan terdapat 2 tujuan evaluasi program yaitu: Tujuan formatif dimana evaluasi bertujuan sebagai pengembangan dan perbaikan kegiatan yang sedang berjalan, hal ini termasuk program, orang, produk dll.(Ananda 2017) Tujuan sumatif dimana evaluasi bertujuan sebagai pertanggungjawaban, penentu rekomendasi kelanjutan atau pemberhentian program.(Ambiyar and Mukhtar 2019)

Berdasarkan beberapa sudut pandang para pakar tentang tujuan kegiatan evaluasi program, maka disimpulkan bahwa evaluasi program memiliki bertujuan untuk memberikan informasi/data hasil evaluasi sebagai bahan kritik dan rekomendasi bagi penanggung jawab program untuk mengambil keputusan

mengenai program, serta menilai efektivitas dan efisiensinya program tersebut telah dilaksanakan.

D. Fungsi Evaluasi Program

Sondang (Nugraha, Mardian, and Hadinata 2019) mengatakan terdapat 4 fungsi evaluasi program diantaranya yaitu:

- 1 Fungsi ekspansi: fungsi evaluasi dapat melihat tujuan dan sasaran dari program yang dievaluasi, mengetahui kualitas yang dicapai dan cara mencapainya juga dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi.
- 2 Fungsi kepatuhan: evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat sesuai standar dan prosedur program yang dievaluasi
- 3 Fungsi *auditing*: evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui *output* / hasil dari program yang dijalankan sesuai dengan sasaran pada kebijakan program telah terencana sebelumnya.
- 4 Fungsi *Akunting*: evaluasi perogram ini dapat berfungsi mengetahui sebab akibat ataupun dampak dari pelaksanaan program tersebut.

E. Karakteristik Evaluasi Program

Evaluasi program pada umumnya memiliki 8 karakteristik khusus yaitu:

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan evaluasi program mengikuti kaidah yang sama dengan penelitian pada umumnya.
2. Dalam melakukan evaluasi program, peneliti harus berpikir secara terkonsep, memandang program yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk menghasilkan kinerja objek yang maksimal pada program yang dievaluasi.
3. Untuk memahami status objek yang dievaluasi secara keseluruhan, penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang berperan sebagai variabel penentu keberhasilan program.

4. Standar kriteria digunakan sebagai tolok ukur dan perbandingan untuk mengabarkan kondisi nyata dari data yang dikumpulkan dan menghasilkan kesimpulan.
5. Hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai bentuk pemberian informasi atau merekomendasikan kebijakan atau strategi program untuk selanjutnya. Sehingga pada akhirnya ketika melakukan kegiatan evaluasi program, tujuan program dijadikan sebagai standar kriteria atau tolok ukurnya.
6. Untuk menentukan mana bagian dari program yang belum terlaksanakan, maka terlebih dahulu harus diidentifikasi komponen-komponennya, kemudian sub komponennya, dan terakhir indikator programnya.
7. Standar, standar, atau tolok ukur diterapkan pada indikator, yang merupakan komponen terkecil dari program, sehingga kekurangan dalam proses kegiatan dapat dideteksi dengan benar.
8. Dari hasil evaluasi program, perlu dihasilkan rekomendasi yang tepat dan akurat untuk memutuskan tindakan tindak lanjut yang relevan.(Ananda 2017)

Berdasarkan 8 poin diatas dapat terlihat bahwasanya evaluasi program sangat menuntut kepastian data yang kredibel dan objek penelitian yang factual sehingga hasil dari evaluasi dapat menjadi rekomendasi keberlangsungan program.

F. Model-Model Evaluasi Program

Evaluasi program memiliki banyak model yang dapat diterapkan oleh evaluator. Model evaluasi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bagian apa yang menjadi titik fokus yang ingin dievaluasi. Banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli diantaranya ialah:

1 Model Evaluasi Stufflebeam's/ model CIPP

Stufflebeam merancang metodologi ini, yang dikenal sebagai model CIPP (*konteks, input, proses, produk*), keempat poin evaluasi model tersebut yang artinya (konteks, masukan, proses, dan hasil), yang mengkaji program sebagai suatu sistem terpadu. (Ananda 2017) Tiap tahap pada model evaluasi ini memiliki keterkaitan dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan sebuah program. Keterhubungan model evaluasi CIPP dengan pengambilan keputusan program dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.1 keterhubungan model evaluasi CIPP dengan pengambilan keputusan

Evaluasi	Konteks	input	proses	Produk	Dampak
Pembuatan Keputusan	Objektif	Solusi, strategi, desain, prosedur	Implementasi	Dihentikan, dilanjutkan, dimodifikasi program ulang	Akibat yang ditimbulkan dari rogram
Akuntabilitas	Rekaman objek	Rekaman pilihan strategi, desain	Rekaman proses aktual	Rekaman pencapaian dan keputusan	Pengaruh langsung atau tidak langsung

Empat aspek inti yang dievaluasi pada model ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Context Evaluation: evaluasi ini disebut dengan penilaian kebutuhan program. Evaluasi ini membantu menilai masalah ketepatan sasaran, menilai responsive tujuan terhadap kebutuhan, mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, dan menentukan prioritas kebutuhan program yang akan dijalankan. (Harding 2012)

Input Evaluation: Fokus utama evaluasi ini adalah bagaimana cara untuk dapat mencapai tujuan dari program dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia beserta alternative-alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan. Kajian ini membantu dalam mengevaluasi pilihan pengambilan keputusan, strategi, dan komponen sumber daya yang diperlukan, seperti sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dana/anggaran, proses, dan aturan sehingga menghasilkan rencana program yang efektif dan efisien. (Tayibnapis 2008)

Process Evaluation: evaluasi ini membantu memantau hambatan proses berjalannya suatu program, memastikan program diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan evaluasi ini sebagai bahan *feedback* kepada manajer/ pengambil keputusan agar dapat menilai apa yang perlu diperbaiki kedepannya. (Umam and Saripah 2018)

Product Evaluation: evaluasi produk ini menjadi *judgement outcomes* dari 3 tahap sebelumnya (konteks, input, proses). Stufflebean memperluas cakupan evaluasi ini menjadi *impact Evaluation* (evaluasi pengaruh), *effectiveness evaluation* (evaluasi keefektifan), *sustainability evaluation* (evaluasi berkelanjutan) dan *transportabilition evaluation* (evaluasi transformasi). (Stufflebeam 2003)

Evaluasi produk bertujuan untuk menilai ketercapaian/ keberhasilan suatu program yang dievaluasi. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, pembandingan antara kenyataan proses dilapangan dengan tujuan program, melakukan penafsiran secara rasional. Hasil evaluasi ini ditandai dengan evaluator memberikan rekomendasi terhadap kelangsungan program (dilanjutkan, dimodifikasi, dihentikan). (Ananda 2017)

Secara lebih spesifik Stufflebean menyatakan bahwa tujuan utama model evaluasi prorogram ini ialah untuk memperbaiki sebuah

program yang sedang berjalan atau sedang berproses. (Suryadi, Sari, and Nurfitriani 2022)

Rusydi Ananda dan Tien Rafida juga mengedepankan pendapat bahwa model evaluasi program CIPP ini dapat membantu pengambilan keputusan dengan menjawab 4 poin pertanyaan dasar pada hasil evaluasi program yang diharapkan, yaitu?

- a. Apa yang harus dilakukan (*what should we do?*). pertanyaan ini akan terjawab dengan evaluator melakukan pengumpulan data dan menganalisis *need assesement* yang mengarah pada penentuan tujuan, prioritas dan sasaran.
- b. Bagaimana kita melakukan (*how should we do it?*). Pertanyaan ini terjawab dengan evaluator menganalisis sumber daya serta tahapan-tahapan pengimplementasian program yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebuah program.
- c. apakah yang dikerjakan sesuai rencana (*are we doing it as planned?*) dari pertanyaan ini evaluator menganalisis kesesuaian program dengan melakukan pengawasan/ monitoring secara berkelanjutan, sehingga dapat terlihat kelebihan dan kekurangan program, konflik dalam pelaksanaan program dan ketercapain tujuan program sesuai dengan harapan saat direncanakan.
- d. Apakah program berhasil (*did it work?*) pertanyaan ini terjawab setelah evaluator melaksanakan tahapan evaluasi dan menghasilkan poin evaluasi produk berupa perbandingan *outcome* dengan hasil yang diharapkan. Hasil evaluasi poin ini akan menjadi dasar untuk pemimpin memutuskan program perlu di perbaiki, dilanjutkan atau berhentikan. (Ananda 2017)

2 Model evaluasi Stake (*countenance evaluation*)

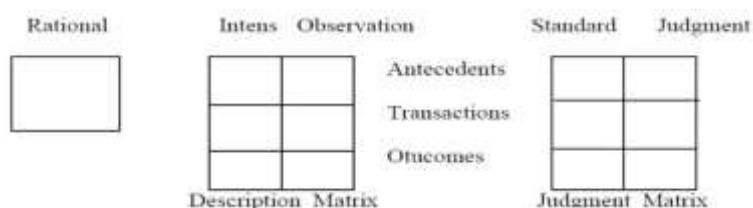
Stake memperkenalkan metodologi evaluasi ini dengan model (konten) keseluruhan. Teknik ini disebut juga model pertimbangan karena evaluator membandingkan hasil evaluasi program dengan apa yang terjadi pada program lain. Menggunakan objek sasaran yang sama, kemudian membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar program yang telah ditetapkan. (Sukardi 2010)

Terdapat 2 matriks dalam model evaluasi Stake yaitu: matriks *description* (gambaran) yang dikategorikan dalam perencanaan tujuan dari program dan observasi apa yang terjadi dilapangan. matriks *judgement* (pertimbangan) dikategorikan atas standar pertimbangan. (Divayana 2018)

Pada tiap bagian matriks terdapat 3 urutan pelaksanaan yang menjadi titik fokus evaluasi program model ini diantaranya ialah:

- a. *Antecedents* yaitu kondisi dimana sebelum dilakukannya arahan melakukan program namun ada hubungan dengan hasil, contohnya: latar belakang guru, ketersediaan sumber daya yang digunakan dll.
- b. *Transaction* yaitu proses pelaksanaan program yang ingin dievaluasi.
- c. *Outcome* yaitu efek dari pelaksanaan program, contohnya peningkatan kinerja guru dll. (Ananda 2017)

Matriks model evaluasi Stake dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Matrix Evaluasi Stake

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan pada *Description Matriks* berisikan Intens atau (*goals*) merupakan kategori pertama yaitu sesuatu yang direncanakan dalam pengembangan program kemudian terdapat *observation* sesuatu yang berhubungan dengan implementasi program yang dikembangkan atau sebuah efek yang dilihat dari pengembangan program.

Pada *judgement Matriks* berisikan aspek standar dimana ini dimaksudkan ialah kriteria yang perlu dipenuhi oleh program yang sedang dikembangkan, dalam hal ini kategori standarnya ialah *Antecedents* (kesiapan), *Transaction* (pelaksanaan), *Outcome* (hasil) yang dijelaskan diatas. Evaluator/ peneliti dituntut untuk mendapatkan data mengenai 3 kategori tersebut. Kemudian selanjutnya dalam matriks ke 2 terdapat aspek *judgement* (pertimbangan), pada tahap ini evaluator/ peneliti melakukan pertimbangan data yang di dapat pada matriks pertama dengan data matriks kedua. Evaluator/ peneliti dapat memberikan pertimbangan, kritik, saran dan masukan akan program tersebut, tidak hanya itu evaluator dapat melihat pemanfaatan dari program.

Untuk melakukan penerapan model evaluasi Stake dapat melalui beberapa langkah diantaranya ialah:

- a. Pengumpulan data: Evaluator mengumpulkan data tentang program yang sedang ditinjau. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Sebelum melanjutkan, perlu ditetapkan kerangka anteseden (input), transaksi (proses), dan hasil.
- b. Analisis data: analisis dilakukan secara logis dan empiris. Tahap ini dilakukan analisis untuk mencari tahu kan hubungan antara situasi awal, masa proses transaksi, dan hasil program. Evaluator perlu mengetahui kriteria awal apakah dapat dipenuhi dalam

transaksi yang akan dilakukan atau terdapat model transaksi lain yang lebih efektif.

- c. Analisis *congruence* (kesesuaian) : Pada tahap ini, evaluator membandingkan apa yang dinyatakan dalam tujuan (niat) dengan apa yang terjadi sepanjang tindakan (observasi). Dalam situasi ini, evaluator memvalidasi bahwa rencana tersebut cocok untuk diterapkan di lapangan.
- d. Pertimbangan hasil: tahapan terakhir ini, evaluator bertugas memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji. Pertimbangan tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ada. (Ananda 2017)

3 Model Evaluasi *Discrepancy*

Model evaluasi ini dipopulerkan oleh Malcom Provius juga disebut model kesenjangan. Prosedur evaluasi model ini dimaksudkan untuk melihat tingkat kesesuaian standar yang telah ada dengan pengaktualisasian program tersebut. (Arikunto and Jabar 2007)

Kesenjangan yang dapat dianalisis dengan menggunakan model *Discrepancy* adalah sebagai berikut: 1) kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, 2) kesenjangan status kemampuan dan standar kemampuan, 3) kesenjangan tujuan, 4) kesenjangan bagian program yang perlu dimodifikasi, 5) kesenjangan sistem yang tidak konsisten. tahap pelaksanaannya dimulai dari mendesain, instalasi, proses, pengukuran tujuan dan terakhir perbandingan. (Muryadi 2017)

4 Model Evaluasi Formatif-Sumatif

Scriven mempopulerkan metodologi penilaian ini, yang terdiri dari dua langkah. Evaluasi formatif yang menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan produk yang direncanakan. Sedangkan sumatif memberikan informasi apa yang perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk atau program lebih efektif dan efisien. (Tayibnapis 2008)

Pelaksanaan model ini dimulai dari evaluasi formatif dengan tahapan:

- 1) *One-to-one*: yang perlu dilakukan pada tahapan ini dari mendatangi *expert/* ahli, mengembangkan proses yang dilaksanakan, melakukan *judgement* oleh *expert*.
- 2) *Small group evaluation*: tahap ini membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan tentang program yang akan dievaluasi dengan menghasilkan kritik dan saran. Hasil diskusi dikonfirmasi Kembali kepada subjek pengguna.
- 3) *Field trial evaluation* : Tahap ini melakukan uji lapangan terhadap program dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dan berdasarkan temuan data yang terkumpul, dilakukan revisi/perbaikan produk dan desain program. (Ananda 2017)

Evaluasi formatif terjadi pada saat program berjalan, sedangkan evaluasi sumatif terjadi setelah pelaksanaan program berakhir. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang manfaat/ kegunaan program. Kemudian yang menjadi audien evaluasi sumatif ialah konsumen potensial seperti guru, siswa dan audien formatif ialah personil program. (Sukardi 2010)

5 Model evaluasi Kirkpatrick

Model evaluasi ini populer dengan nama *Kirpartick four levels evaluation model*. Model evaluasi Kirkpatrick identic digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan.(Ananda 2017) Proses evaluasi dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

Evaluating reaction: mengukur tingkat kepuasan peserta (*customer Satisfaction*) terhadap program pelatihan. *Evaluating learning*: menilai hasil output pembelajaran saat pelatihan berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan. *Evaluating behaviour*: penilaian kinerja

dan kemampuan peserta pelatihan saat Kembali ke tempat kerja. *Evaluating result*: penilaian hasil akhir berupa *impact* program pelatihan. (Nurhayati 2018)

Dari banyaknya model evaluasi program, semuanya model dapat digunakan dengan syarat harus sesuai konteks, tepat dengan tujuan evaluasi program yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan model evaluasi program Stake dengan menekankan pada membandingkan standar/ kebijakan program Indonesia yang telah ditetapkan dalam Permendikbud dengan pengaplikasiannya di lapangan/ Lembaga Pendidikan.

G. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar diawali dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengarahkan Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Tabungan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia (PIP).(Kemendikbud 2018)

Program Indonesia Pintar, yang sering disebut PIP, merupakan program layanan pemerintah yang menawarkan bantuan keuangan untuk siswa/siswi dengan kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu dalam biaya pendidikan. Hal ini pada dasarnya memperluas tujuan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).(Kemendikbud 2015)

Bantuan dana PIP dari pemerintah ini tidak hanya diberikan untuk membantu siswa sekolah dasar saja namun untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat dari keluarga berpenghasilan rendah sehingga kurang dalam pembiayaan pendidikan, maka mereka diberi bantuan secara finansial dengan menawarkan bantuan keuangan, peningkatan akses, dan peluang pendidikan. (Kemendikbud 2022)

Program Indonesia Pintar ini perlu disosialisasikan kepada peserta didik dan orang tua penerima PIP oleh pihak sekolah, Sosialisasi ini merupakan satu dari banyak layanan informasi Pendidikan yang diberikan pihak sekolah dengan tujuan memberikan informasi akan latar belakang PIP, tujuan dan pemanfaatan

program sehingga orang tua dan siswa penerima dapat memanfaatkan dana sesuai tujuan dari program. Layanan informasi ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan media teknologi informasi (IT) atau Non IT. (Siahaan, Hidayat, and Rustam 2020) Pihak sekolah dapat memanfaatkan media Non IT seperti mading sekolah media berbasis teknologi informasi (IT) dapat melalui aplikasi komunikasi Whatsapp dengan memberikan informasi terkait PIP kepada orang tua siswa dan siswa penerima.

H. Tujuan Program Indonesia Pintar

Berdasarkan (Kemdikbud 2015) menjelaskan terdapat beberapa tujuan pemerintah membuat PIP yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan PIP adalah memberikan kesempatan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk memperoleh layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, serta mendorong program wajib belajar 12 tahun untuk semua kalangan.
2. PIP berupaya mencegah siswa *drop up* dari sekolah atau tidak meneruskan pendidikan karena masalah keuangan.
3. PIP bertujuan untuk menjaring peserta didik yang putus sekolah atau tidak meneruskan pendidikan agar dapat kembali menerima layanan pendidikan di sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), dan lain-lain. satuan pendidikan nonformal, dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu program Nasional dan tujuan dari PIP ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, empat tujuan yang tercantum diantaranya ialah:

1. Program Indonesia Pintar diterapkan bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Diharapkan dapat meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dengan ditandai jumlah angka putus sekolah anak bangsa yang menurun

3. Bertujuan agar menurunnya kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, baik dari kalangan keluarga kaya dan miskin, wilayah perkotaan hingga perdesaan.
4. Membantu meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi bagi siswa jenjang pendidikan menengah.
(Nurokhmah 2021)

I. Sasaran program Indonesia pintar

Berdasarkan (Kemdikbud 2015) memaparkan pokok sasaran program Indonesia pintar adalah siswa dengan kisaran umur 6 tahun hingga 21 tahun yang dapat diklasifikasikan pada 6 kelompok yaitu sebagai berikut:

- 1 siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS)
- 2 siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3 siswa yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan
- 4 siswa yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
- 5 siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam
- 6 siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah

Kemudian dari 6 kelompok yang diklasifikasi diatas dapat diberikan penjelasan lebih spesifik kriteria penerima PIP sebagai berikut:

1. Penerima PIP dikategorikan siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterima dari sekolah yang telah disetujui oleh kementerian pendidikan
2. Penerima PIP yang belum memiliki KIP, namun bisa mendaftarkan sebagai penerima dengan syarat masuk dalam katagorikan siswa yang keluarganya mengikuti program keluarga sejahtera dibuktikan dengan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS/ KPS) atau keluarga siswa termasuk sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) .

3. Siswa calon penerima PIP juga berkemungkinan menapatkan dana bantuan PIP dengan pertimbangan data siswa yang tersimpan dalam Educational Management Information System (EMIS). Data ini berasal dari Kementerian Agama Pusat dengan berbagai pertimbangan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan.
4. Prioritas PIP juga diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dengan kondisi keluarga kurang mampu dengan syarat memiliki SKRTM/ SKTM/ SKMM dari Kelurahan/ desa/ madrasah.
5. Bagi anak usia masih dalam usia sekolah wajar dengan rentang umur 6 – 21 tahun dan telah mendaftar sebagai penerima KIP, namun sudah terlanjur berhenti mengikuti pembelajaran di sekolah ataupun tidak terdaftar lagi di sekolah, haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri ke sekolah untuk mendapatkan dana PIP. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2017)

Pada (Kemendikbud 2022) menjelaskan pertimbangan khusus penerima PIP diantaranya ialah:

1. Peserta didik yang bertempat tinggal di panti asuhan dan berstatus yatim atau piatu.
2. Peserta Didik yang kemungkinan besar berhenti sekolah atau peserta didik yang bersekolah kembali setelah putus sekolah (drop out)
3. Peserta Didik yang masuk kategori korban terdampak bencana alam
4. Peserta Didik dari korban daerah yang sedang konflik
5. Peserta Didik yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas)
6. Peserta didik yang orang tua/walinya merupakan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik sasaran dari PIP ialah peserta didik yang telah divalidasi data nya oleh pihak sekolah sebelumnya melalui data Dapodik yang telah disusun. Peserta didik yang telah memiliki KIP dan siswa

yang termasuk keluarga miskin atau rentan miskin sesuai dengan pertimbangan ketentuan petunjuk teknis PIP dan peserta didik yang tidak memiliki KIP dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/ kelurahan sebagai berkas awal untuk mendaftar PIP

J. Dana Program Indonesia Pintar

Besaran bantuan yang diberikan pemerintah dalam penyaluran dana Pendidikan melalui program Indonesia pintar diklasifikasikan berdasarkan tingkatan Pendidikan dan tahun ajaran. Hal ini dijelaskan dalam (Jendral Direktur Pendidikan Islam 2022), dapat dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah dana PIP Madrasah tiap satuan Pendidikan tahun 2022

Jenjang pendidikan	Besaran dana pada anggaran tahun ajaran semester genap	Besaran dana pada anggaran tahun ajaran semester ganjil
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1 Siswa Kelas satu sampai kelas lima menerima dana senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	1 Siswa Kelas dua sampai kelas enam menerima dana senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
	2 Siswa kelas enam menerima dana senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)	2 Siswa kelas satu menerima dana senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	Siswa Kelas 7 dan 8 menerima dana senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	1	Siswa Kelas 7 dan 9 menerima dana senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
	2	Siswa kelas 9 menerima dana senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	2	Siswa kelas 8 dan 9 menerima dana senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Madrasah Aliyah (MA)	1	Siswa Kelas 10 dan 11 menerima dana senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	1	Siswa Kelas 11 dan 12 menerima dana senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
	2	Siswa Kelas 12 Semester menerima dana senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	2	Siswa Kelas 10 Semester menerima dana senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Besaran bantuan dana PIP pada tahun anggaran 2024 telah terjadi perubahan kenaikan jumlah dana yang diterima yang dijelaskan dalam (Direktorat Jendral Pendidikan Islam 2023) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah dana PIP tiap satuan Pendidikan tahun 2022

Jenjang pendidikan	Besaran dana pada anggaran tahun ajaran semester genap	Besaran dana pada anggaran tahun ajaran semester ganjil
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	• Siswa Kelas satu sampai kelas lima	• Siswa Kelas dua sampai kelas enam

	<p>menerima dana senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa kelas enam menerima dana senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) 	<p>menerima dana senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa kelas satu menerima dana senilai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa Kelas 7 dan 8 menerima dana senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) • Siswa kelas 9 menerima dana senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa Kelas 7 dan 9 menerima dana senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) • Siswa kelas 8 dan 9 menerima dana senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Madrasah Aliyah (MA)	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa Kelas 10 dan 11 menerima dana senilai Rp1.800.000,00 • Siswa Kelas 12 Semester menerima 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa Kelas 11 dan 12 menerima dana senilai Rp1.800.000,00 • Siswa Kelas 10 Semester menerima

	dana	senilai	dana	senilai
	Rp900.000,00		Rp.900.000,00	

Terdapat perbedaan jumlah dana yang diterima siswa tiap tahap berdasarkan tingkatan kelas pada masing- masing lembaga pendidikan, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya ialah:

1. Penyaluran dana PIP mengikuti tahun anggaran, bukan tahun ajaran. Satu tahun anggaran di Indonesia dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember.
2. Seperti halnya pada madrasah aliyah siswa kelas 10 hanya menjalani satu semester dalam satu tahun anggaran, yaitu semester ganjil. Sedangkan siswa kelas 11 dan 12 menjalani dua semester dalam satu tahun anggaran, yaitu semester ganjil dan genap.

K. Mekanisme Program Indonesia Pintar

Mekanisme Program Indonesia Pintar yang terbaru tercantum dalam kebijakan Dikdasmen (Pendidikan dasar dan menengah) dijelaskan pada (Direktur Jendarl Pendidikan Islam 2022)

1. Mekanisme penetapan penerima PIP madrasah

Siswa madrasah dikategorikan sebagai penerima PIP ditetapkan berdasarkan hasil keputusan PPK Direktorat KSKK Madrasah dan disahkan oleh KPA dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemutakhiran data siswa penerima PIP

Madrasah melakukan verifikasi dan validasi status keaktifan siswa melalui sistem aplikasi SIPMA, kemudian melakukan konfirmasi ke Kemenag. Kemenag Kabupaten/kota melakukan pengawasan dan menyamaikan berita acara kepada Kemenag Provinsi. Kemenag Provinsi memberikan persetujuan dan menyampaikan berita acara yang berisikan rekapitulasi data

siswa yang telah diverifikasi kepada Direktorat KSKK Madrasah.

- b. Pendataan data siswa yang dikelola oleh EMIS berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
- c. Penetapan penerimaan melalui data usulan madrasah

Terlebih dahulu mendata siswa dengan menyesuaikan kriteria penerima PIP oleh madrasah Madrasah mengusulkan siswa yang telah memiliki NISN yang valid dan menginput data siswa ke aplikasi EMIS dengan alasan kelayakan sebagai calon penerima PIP. Kemendiknas melakukan verifikasi data siswa yang diajukan madrasah kemudian menyampaikannya kepada Direktorat KSKK madrasah untuk menetapkan daftar siswa penerima PIP, melalui keputusan PPK berupa surat keputusan yang disahkan oleh KPA Direktorat Jendral Pendidikan Islam.

2. Pemberian KIP

Siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP akan diberikan kartu Indonesia pintar (KIP). KIP Berlaku mulai dari surat keputusan siswa sebagai penerima PIP ditetapkan sampai dengan surat keputusan sebagai penerima berikutnya. KIP berisikan : Nomor KIP, nama siswa, tanggal lahir, NIK, NISN, tahun terbit, QR Code.



Gambar 2.2 Kartu Indonesia Pintar

3. Mekanisme penyaluran Dana PIP

Mekanisme penyaluran PIP dilakukan melalui Bank atau pos penyalur. Tahapan penyaluran PIP dimulai dari: dana PIP madrasah disalurkan melalui rekening tabungan SimPel (simpanan pelajar), Direktorat KSKK Madrasah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak Bank, PPK menyampaikan data penerima PIP yang yrlah tervalidasi kepada bank penyalur untuk membuat rekening tabungan SimPel, setelah pembuatan rekening pihak bank penyalur memberikan kepa PPK untuk menetapkan daftar penerima PIP melalui surat keputusan yang disahkan oleh KPA, PPK mencairkan dana PIP ke rekening bank penyalur dan bank penyalur menyalurkan dana PIP paling lambat 30 hari sejak dana di tranfer dari Kas Negara.

4. Mekanisme Aktivasi Rekening

Aktivasi rekening ini diperuntukkan untuk penerima PIP baru, jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai penerima PIP dan telah mempunyai rekening simpanan pelajar maka tidak perlu melakukan aktivasi rekening kembali. Aktivasi rekening untuk siswa MA dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Aktivasi rekening siswa secara mandiri: Siswa MA dapat melakukan aktivasi rekening secara pribadi tanpa harus didampingi orang tua dan guru madrasah, cukup dengan membawa persyaratan: fotocopy dan dokumen asli dari salah satu tanda pengenal (KIP/ Kart pelajar/ KTP/ surat keterangan dari lurah), foto copy KK dan surat keterangan kepala madrasah. Mengisi dan menandatangani dokumen pembuatan rekening.
- b. Aktivasi rekening siswa secara berkelompok: bank penyalur menjamin akses aktivasi rekening penerima PIP dengan mendatangi secara angung ke lokasi madrasah atau tempat yang telah disepakati oleh bank penyalur dan pihak madrasah.

5. Mekanisme Penarikan dana PIP

Penarikan dana Program Indonesia pintar dapat diambil secara langsung dengan ketentuan yang berbeda setiap jenjang pendidikan. Bagi siswa MI (Madrasah Ibtidaiyah) dapat melakukan penarikan dengan dampingan orang tua atau wali dapat pula dengan guru atau tim pelaksana PIP madrasah, namun untuk siswa jenjang pendidikan MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) dapat menarik dana PIP tanpa dampingan orang tua/wali. (Direktur Jendral Pendidikan Islam 2022)

Siswa yang menarik dana PIP secara langsung dapat langsung datang ke bank penyalur dengan membawa tanda bukti identitas seperti: KTP, Kartu pelajar, KK dan membawa ATM serta buku tabungan. Jika penarikan dilakukan langsung ke mesin ATM hanya perlu membawa kartu ATM dan PIN ATM. (Direktur Jendral Pendidikan Islam 2022)

Penarikan dana PIP juga dapat melalui pihak kuasa penerima PIP dengan membawa buku rekening simpanan pelajar, penarikan seperti ini dapat diterapkan jika memiliki alasan seperti: lokasi tempat tinggal sulit mengakses bank penyalur/ cukup jauh dari lokasi bank penyalur, kurangnya transportasi dan cukup besar biaya transportasi ke bank penyalur, siswa/ orang tua/wali sedang sakit, disabilitas dll. (Sholikhah 2019)

Pihak kuasa penerima PIP harus melengkapi persyaratan berkas baik aktivasi rekening tabungan pelajar maupun dana PIP sebelum dapat ditarik. Mahasiswa yang bersangkutan harus segera mendapatkan uang PIP yang ditarik, atau paling lambat lima hari setelah pengambilan dana.

6. Pelaporan, Evaluasi dan monitoring PIP

Tahapan terakhir dalam program Indonesia Pintar ialah melakukan Pelaporan program yang merupakan pembuatan laporan, evaluasi dan monitoring program sebagai bentuk pemantauan sebuah program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, sesuai sasaran atau telah terjadi ketidak sesuaiaian dan kendala. Pada (Direktotat

Jendral Pendidikan Islam 2023) dijelaskan bahwa pihak madrasah ditugaskan membuat laporan penerimaan bantuan PIP sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atau waktu tertentu untuk disampaikan kepada kantr kementian agama kabupaten/kota.

Tahapan monitoring dan evaluasi PIP dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian *output* dan *outcome* PIP. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, Kementrian Agama Kabupaten Kota. Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa cara: kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi (telepon, whatsapp, email dll) (Direktur Jendarl Pendidikan Islam 2022)

L. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar memberikan bantuan keuangan kepada siswa usia sekolah dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah bermaksud menggunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang menerima PIP untuk keperluan sekolah atau pendidikan. diantaranya ialah:

1. membeli buku dan alat tulis
2. membeli pakaian seragam sekolah beserta perlengkapan sekolah lainnya seperti: sepatu, tas dll.
3. biaya transportasi siswa pergi ke sekolah
4. uang jajan bagi siswa
5. biaya kursus atau les tambahan bagi siswa pendidikan formal
6. biaya praktik tambahan atau biaya magang / penempatan kerja (Kemendikbud Direktur Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah 2019)

M. Pengelola PIP di Madrasah

Pengelola atau pelaksana PIP di tingkat madrasah ditetapkan oleh kepala madrasah. Pengelola PIP madrasah ditetapkan dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab umum adalah kepala madrasah

2. Tim pelaksana teknis terdiri dari:
 - a. Pendidik/ tenaga kependidikan yang ditugaskan kepala madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola penyaluran dana PIP.
 - b. Pendidik/ tenaga kependidikan yang ditugaskan kepala madrasah untuk bertanggung jawab sebagai operator pengelola data PIP. (Direktur Jendral Pendidikan Islam 2022)

N. Tugas Pengelola PIP Madrasah

Pengelola PIP madrasah memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dikerjakan, berdasarkan petunjuk teknis pada (Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2017) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tim pelaksana Program Indonesia Pintar madrasah melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan tim pelaksana program Indonesia pintar kabupaten/ kota
2. Tim pelaksana PIP madrasah melakukan sosialisasi program dengan mekanisme penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada keluarga miskin.
3. Tim pelaksana PIP madrasah melakukan seleksi calon penerima PIP yang disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan yang ada.
4. Tim pelaksana PIP madrasah mendata siswa calon penerima PIP
5. Tim pelaksana PIP madrasah membuat surat penetapan usulan calon penerima PIP yang berasal dari KIP, KKS/KPS dan kriteria lainnya.
6. Tim pelaksana PIP mengirimkan salinan data-data siswa calon penerima PIP ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota
7. Khusus madrasah negeri: tim pelaksana PIP madrasah menetapkan siswa penerima PIP, menyalurkan manfaat program Indonesia pintar dan membuat laporan pelaksanaan juga realisasi program Indonesia Pintar.
8. Tim pelaksana PIP Madrasah mengumumkan siswa penerima PIP pada papan pengumuman madrasah

9. Mengawasi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan program Indonesia pintar di madrasah
10. Tim pelaksana madrasah memberikan informasi jadwal pencairan atau pengambilan dana ke bank dan memberikan arahan penggunaan dana yang diperoleh.
11. Menyusun laporan jumlah siswa penerima program Indonesia Pintar
12. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada orang tua/wali siswa akan penyaluran dan pemanfaatan dana PIP yang didapatkan
13. Memberikan pelayanan dan arahan kepada masyarakat terkait Program Indonesia Pintar.

Tugas Pengelola PIP madrasah mengalami sedikit perubahan pada Petunjuk Teknis (JUKNIS) PIP oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam tahun 2023, tugas-tuganya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh warga madrasah
2. Mendata siswa calon penerima PIP dan mengupload data siswa ke dalam aplikasi EMIS. Variabel data siswa yang perlu diupload dan dilengkapi pada aplikasi EMIS ialah:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK),
 - b. Nama siswa,
 - c. Jenjang kelas siswa,
 - d. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN),
 - e. Tempat lahir,
 - f. Tanggal lahir,
 - g. Nama ibu kandung,
 - h. Nama madrasah,
 - i. Nomor Statistik Madrasah (NSM),
 - j. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),
 - k. Alamat madrasah,
 - l. Kecamatan madrasah,
 - m. Kabupaten madrasah,

- n. Provinsi madrasah,
 - o. Jenis pekerjaan orang tua,
 - p. Penghasilan orang tua. (Direktorat Jendral Pendidikan Islam 2023)
3. Menyeleksi dan mengusulkan siswa sebagai calon penerima PIP sesuai sasaran dan prioritas.
 4. Bertanggung jawab akan data pengusulan calon penerima PIP
 5. Bekerjasama dengan Unit Kerja Oprasional bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening simpan pelajar untuk siswa penerima PIP.
 6. Menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana PIP
 7. Memantau proses pencairan dana PIP di bank penyalur.
 8. Memberikan arahan kepada siswa untuk memanfaatkan dana PIP sesuai peruntukannya
 9. Menyampaikan laporan penyaluran dan pencairan dana PIP kepada Kemenag kabupaten/kota
 10. Memberikan pelayanan dan menerima pengaduan siswa terkait dana PIP. (Direktur Jendral Pendidikan Islam 2022)

O. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya ialah:

- 1 Penelitian tersebut dilakukan Nur Azizah pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian analisis kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 17 Bone telah berfungsi secara optimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator pelaksanaan, antara lain: 1) Kriteria dan tujuan kebijakan PIP benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kurang mampu di sekolah. 2) Sumber daya dalam program ini baik manusia

maupun infrastruktur sudah baik. 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan, komunikasi antar pelaksana, bermanfaat dalam mendorong keberhasilan kebijakan PIP. 4) Ciri-ciri agen yang melaksanakan SOP konsisten dengan kebijakan ini. 5) berperan sebagai pelaksana, melaksanakan implementasi kebijakan dengan baik karena memahami standar operasional prosedur yang ada, 6) Dari segi iklim sosial ekonomi dan politik, orang tua sekolah mendukung kebijakan PIP. (Azizah 2021)

Penelitian penulis dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melihat objek penelitian program Indonesia Pintar dan yang membedakan penelitian ini adalah hanya melihat unsur pelaksanaan program, sedangkan penelitian sebelumnya hanya melihat evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP).

- 2) Fatih Permatasari dan Ahmad melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Program Indonesia Pintar di Madrasah Swasta Ibtidaiyah Kecamatan Blimbing Kota Malang.” Menggunakan model CIPP. Penelitian ini menggunakan penelitian evaluatif dengan pendekatan evaluasi CIPP. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelola PIP mempunyai kesadaran yang sangat kuat terhadap peraturan perundang-undangan. 2) Kuota PIP terbatas sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penerima PIP yang dituju. 3) PIP benar-benar tepat sasaran, dengan rata-rata pendapatan penerima manfaat sebesar \$500.000 per bulan. 4) Cara pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan tidak transparan. 5) Pengurus PIP tingkat Kementerian Agama Kota Malang belum memiliki database PIP tersebut. (Sari and Ahmad 2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah mengkaji dengan objek yang sama dengan melakukan penelitian yang sama yaitu penelitian evaluasi. Namun yang membedakan ialah penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP dan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan model evaluasi Stake.

- 3 Nurhasana Hayati dan Eka Yuliana Sari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul *Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar Di Sma Negeri 1 Sembawa*. Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) yang di implementasi pada SMAN 1 Sembawa masih berjalan kurang maksimal, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut : 1) terdapat sedikit banyaknya siswa yang menerima dana PIP kurang tepat sasaran, hal ini diantaranya karena data yang digunakan dalam penentuan calon penerima KIP atau PIP masih kurang akurat, 2) kesadaran akan pemanfaatan dana pip oleh siswa dan orang tua Masih kurang, 3) Waktu pencairan dana PIP kadang mengalami keterlambatan karena kurangnya sosialisasi, serta 4) sulitnya proses pencairan dana. (Nurhasana Hayati 2019)

Penelitian penulis dan penelitian ini bersifat komparatif karena keduanya melihat objek penelitian yang sama yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Namun berbeda dengan penelitian ini karena hanya melihat unsur pelaksanaan program saja, sedangkan pada Program Indonesia Pintar (PIP) akan dilakukan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN Sumatera Utara. Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN SU dikarenakan merupakan salah satu madrasah yang menerapkan Program Indonesia Pintar (PIP), selain itu karena lokasi madrasah tempat penelitian ini berlokasi cukup terjangkau oleh peneliti dalam segi biaya dan waktu sehingga dapat mempermudah mendapatkan data penelitian.

B. Data dan Sumber Data

Data merupakan informasi penelitian yang didapatkan dari subjek penelitian atau informan penelitian. (Sugiono 2013) Data penelitian memiliki 2 jenis yang diklasifikasikan berdasarkan sumber memperoleh data. Data beserta sumber data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Data primer: data primer penelitian merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data/ informan. (Sandu and Sodik 2015) Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan informan (pengelola PIP madrasah, siswa penerima PIP), kuesioner yang siswa.
2. Data sekunder: data sekunder penelitian merupakan data pendukung data sekunder, dimana data diperoleh peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada seperti data statistic dari BPS, buku, laporan dll. (Sandu and Sodik 2015) Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis di sekolah yang berhubungan dengan PIP dan foto-foto dokumentasi dalam proses penelitian.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (Suwendra 2018) Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari informan penelitian. Penelitian ini berfokus pada penilaian pengembangan

program, oleh karena itu selain menggunakan metode penelitian kualitatif secara lebih spesifik penelitian ini menggunakan model penelitian evaluasi program CIPP.

Model Evaluasi CIPP merupakan evaluasi yang mengkaji program sebagai suatu sistem terpadu. Penerapan evaluasi ini melawati 4 tahap penilaian yang merupakan singkatan dari namanya CIPP yaitu: konteks, input, proses, dan hasil. (Ananda 2017) pada penelitian ini akan mengkaji 4 tahapan model evaluasi CIPP yang diteliti secara spesifik dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian. yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi *Contexts* PIP: Hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti dalam konteks PIP dalam penelitian ini ialah: a) ketepatan sasaran program Indonesia pintar di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN SU, b) jumlah siswa penerima PIP c) jumlah dana PIP yang diterima.
2. Evaluasi *Input* PIP: Hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti dalam Input PIP dalam penelitian ini ialah: a) ketersediaan SDM, b) fasilitas program PIP di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN SU.
3. Evaluasi *Process* PIP : Hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti dalam Proses PIP dalam penelitian ini ialah: a) sosialisasi program Indonesia pintar di Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN SU, b) tahap pengusulan calon penerima PIP, C) aktivasi rekening simpanan pelajar, d) tahap pencairan dana PIP, e) pelaporan PIP.
4. Evaluasi *Product* PIP: Hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti dalam Produk PIP dalam penelitian ini ialah: a) dampak program, b) pemanfaatan dana PIP.

D. Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian merupakan seorang atau beberapa orang yang dipercayai mempunyai pemahaman, peranan terhadap objek penelitian. Partisipan dapat memberikan informasi, data ataupun pengalaman sebagai

bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan peneliti. (Creswell 2018)

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini diawali dari peneliti melakukan observasi awal untuk mencari tau siapa saja yang berkaitan secara langsung pada program Indonesia pintar di madrasah seperti tim penyelenggaranya. Peneliti menanyakan kepada kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam wawancara pada observasi awal penelitian. Setelah mengetahui siapa yang menjadi tim penyelenggara PIP di madrasah peneliti mencantumkannya sebagai partisipan dan memilih beberapa siswa yang menjadi objek utama sebagai penerima PIP.

Peneliti menetapkan partisipan penelitian ini diantaranya ialah:

Tabel. 3.1 Partisipan Penelitian

No	Inisial	Jenis kelamin		Pendidikan	Jabatan
		L	P		
1	HND	L		S2 Manajemen Pendidikan	WAKA Bid. Kesiswaan
2	MBS		P	S1 Pendidikan Agama Islam	KTU/ Operator Madrasah
3	MFR	L		-	Siswa
4	NAS		P	-	Siswa

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat memberikan kesimpulan hasil dari penelitian, oleh karena itu dibutuhkan penerapan berbagai teknik yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai kebutuhan. Menurut Sugiono, Teknik pengumpulan data merupakan satu langkah utama yang tak boleh terlewatkan dalam penelitian sebagai bentuk memperoleh data atau mendapatkan data yang sesuai standar data yang nantinya akan diolah dalam penelitian. (Sugiono 2013)

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pelaksanaan teknik observasi dalam penelitian ini, peneliti turun ke lapangan/ lingkungan sekolah (Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN Sumatera Utara) untuk melihat kondisinya secara langsung. Kemudian peneliti menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Berdasarkan prosesnya observasi penelitian dibagi dalam 2 jenis yaitu: observasi partisipan dan observasi Non partisipan (Roosinda et al. 2021)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi Non partisipan, dimana peneliti hanya menjadi pengamat independen dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti akan melakukan pengamatan ke Madrasah Aliyah Laboratoriu IAIN SU dan mengamati partisipan penelitian yang menjadi objek penelitian.

Observasi yang dilakukan peneliti pertama kali pada rabu tanggal 28 februari 2024 dengan peneliti datang ke madrasah untuk mensurvei tempat yang akan dijadikan tempat penelitian tesis. Observasi kedua yang dilakukan peneliti pada kamis tanggal 2 mei 2024. Peneliti datang ke madrasah dan melihat guru madrasah memberikan sosialisasi sekilas tentang PIP kepada siswa dan orang tua siswa saat PPDB.

2. Wawancara

Menurut Flanagan Wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan *interviewer* dengan *interviewee* untuk mendapatkan informasi atau untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh *interviewer*. (Radhallah 2021)

Teknik pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini dimulai dengan peneliti membuat skrip pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan terkait. Kemudian peneliti mendatangi madrasah untuk meminta izin penelitian dan membuat janji pertemuan dengan partisipan penelitian untuk melakukan wawancara.

Setelah janji temu yang disepakati, peneliti datang kembali ke madrasah sesuai jadwal yang disepakati dengan para partisipan untuk melakukan wawancara. Pada Senin tanggal 18 Maret, jam 11.00 wib peneliti bertemu dengan informan “HND” di ruangan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk melakukan wawancara, Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya terkait penelitian peneliti.

Wawancara selanjutnya disepakati pada hari jumat 22 Maret 2024, peneliti menemui partisipan “MBS” di ruangan operator madrasah pada jam 15.00 wib. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai skrip pertanyaan wawancara yang telah dibuat peneliti sebelumnya terkait pendataan siswa/siswi penerima PIP dan hal terkait lainnya.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan siswa/siswi penerima PIP pada hari selasa tanggal 26 maret 2024 di depan kelas madrasah. Peneliti mewawancarai 2 siswa yaitu “NAS” dan “MFR” dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang pemanfaatan dana PIP yang diterima mereka, dampak yang mereka rasakan dan hal terkait lainnya.

3. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis yang disusun oleh peneliti. Respon informan tentang pernyataan tersebut yang akan menjadi data penelitian. (Zakaria, Afriani, and Zakaria 2020)

Teknik pengumpulan data dengan kuesioner ini menjadi teknik untuk menghasilkan data penelitian tambahan untuk penjelas dari hasil wawancara. Pada tahap pertama peneliti membuat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan poin-poin pembahasan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan data sesuai dengan tujuan penelitian. (Yusuf 2017)

Setelah pernyataan-pernyataan untuk kuesioner dibuat oleh peneliti, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti menentukan skala penilaian apa yang akan digunakan. Dalam teknik kuisisioner penelitian ini, peneliti menggunakan model skala Guttman sebagai pendekatan angket. Tujuan peneliti memilih menggunakan skala ini agar mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas dari informan yang mengisi kuesioner.

Pada skala ini menggunakan dua alternatif jawaban yaitu “ya” dan ”tidak”.(Yusuf 2017) Cara pemberian skor tiap pernyataan dalam skala ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penilaian Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif	
	Positif	Negatif
YA	1	0
TIDAK	0	1

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan positif dengan jawaban “YA” mendapat skor satu, sedangkan pernyataan negatif/tidak setuju dengan jawaban “TIDAK” mendapat skor nol. (Nazir 2011)

Setelah kuesioner yang dibuat telah selesai, peneliti membuatnya menjadi kuesioner online dengan menggunakan google forms. Selanjutnya pada senin 25 maret, peneliti meminta bantuan kepada wakasek bagian kesiswaan untuk menyebarkan link google forms kepada siswa-siswa penerima PIP melalui grub Whatsaap.

Setelah pengisian kuesioner oleh informan, nantinya peneliti akan menghitung hasil kuesioner menggunakan rumus frekuensi relative (angka persen) sebagai berikut (Sudijono 2012):

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

f : frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : number of case (jumlah frekuensi/ jumlah individu)

P : angka persentase

Hasil persentase dari yang dihitung peneliti yang akan menjadi data tambahan untuk dimasukkan dalam BAB 4 hasil penelitian.

4. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian, dimana data yang terkumpul berasal dari data-data yang telah didokumentasikan seperti buku, laporan, majalah, notulen rapat surat kabar dll. Data dokumentasi ini juga dijadikan data pelengkap dari data hasil wawancara, kuesioner dan observasi.(Afrizal 2014)

Tahapan mendapatkan data dokumentasi dalam penelitian ini dengan peneliti meminta izin kepada pihak madrasah yang bersangkutan, baik dengan kepala tata usaha, wakasek dan operator sekolah untuk mendapatkan dokumentasi

penelitian berupa berkas-berkas madrasah yang berhubungan dengan keperluan data penelitian.

Peneliti pada 23 April 2023 meminta dokumen terkait penerimaan PIP di madrasah kepada wakasek bagian kesiswaan dan beliau memberikan file SK terkait daftar nama-nama siswa penerima PIP dan jumlah dana yang diterima tiap siswa.

Selain dokumentasi berupa berkas dari madrasah seperti data guru, data siswa, jumlah penerima PIP, peneliti juga mengambil dokumentasi berupa foto-foto yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi foto tersebut berupa foto madrasah dan juga foto wawancara dengan informan penelitian. Untuk mendapatkan foto wawancara dengan partisipan peneliti sebelumnya meminta izin kepada partisipan untuk mengambil foto informan saat diwawancarai oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sesuai yang dikemukakan Miles dan Hubberman dalam buku (Sugiono 2013).

Dijelaskan beberapa urutan teknik analisis data yaitu:

1 Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses mengolah data mentah, memilih, memisahkan, dan menyederhanakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi dari informan tentang PIP di Laboratorium Madrasah

Aliyah IAIN Sumatera Utara guna memperjelas gambar sesuai dengan tema penelitian.

Proses reduksi data dalam penelitian ini dimulai dengan peneliti melakukan penyusunan transkrip hasil wawancara dengan informan dan dilanjutkan pengkodean data hasil wawancara atau penentuan tema untuk mendapatkan kejelasan dari sub tema hasil penelitian.

Tahap pertama peneliti membuat 1 file transkrip hasil wawancara untuk masing-masing informan yang berisikan tabel dengan poin-poin : Transkrip wawancara (pertanyaan peneliti dan jawaban informan), ide pokok wawancara, kata kunci dan tema. Selanjutnya peneliti mengisi tiap-tiap tabel tersebut, untuk transkrip jawaban informan peneliti menandai yang menjadi poin penting/ ide pokok dari jawaban informan, peneliti menandai dengan memberikan warna kuning di bagian hasil wawancaranya.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditandai peneliti melengkapi kata kunci dan tema dari wawancara tersebut. Kemudian setelah melengkapi setiap tabel dari masing masing informan, peneliti dapat memilah milih hasil wawancara informan untuk di sajikan di BAB 4 dengan menggabungkan tema yang sama.

2 Penyajian data

Peneliti menyajikan data penelitian di BAB 4 hasil penelitian dengan merangkum hasil wawancara dengan menggabungkan tema wawancara sebagai sub tema dan memadukan dengan hasil

observasi, kuisioner dan dokumentasi sehingga terbentuk gambaran triangulasi teknik dan sumber data.

Setelah peneliti menyajikan data hasil penelitian, peneliti membuat pembahasan pada poin selanjutnya. Peneliti merangkum hasil penelitian setiap poinnya kemudian membahasnya dengan menggunakan teori bahasan yang ada di BAB II penelitian.

3 Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti pada penulisan BAB 5, pada tahap ini peneliti menuliskan kesimpulan-kesimpulan dari hasil data penelitian yang sudah sampai titik jenuh di BAB 4. Kesimpulan yang dituliskan peneliti akan menjadi hasil akhir penelitian ini.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah data dianalisis kemudian data perlu diperiksa keabsahan datanya dengan tujuan data penelitian dapat dinilai valid. Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian maka perlu dilakukan pengujian/ pemeriksaan melalui beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data diantaranya ialah:

- 1 Triangulasi Data: Triangulasi ini juga dapat disebut triangulasi objek data. Triangulasi ini dibedakan menjadi triangulasi waktu, tempat, sumber data/ responden. Triangulasi ini menjadikan waktu, tempat dan
- 2 responden sebagai pembeda dalam mengambil data sehingga dapat memandang data dari sudut pandang yang kompleks dan berbeda.(Sahide 2019)
- 3 Triangulasi Teoritis: triangulasi teoritis ini menggunakan perbandingan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari biasanya peneliti mengambil kesimpulan hasil penelitian.

- 4 Triangulasi Metode: Triangulasi metode merupakan pengujian kredibilitas data melalui pengecekan data dengan teknik yang berbeda untuk menghasilkan data yang sama dan valid seperti melalui wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.(Djiwadono 2015)
- 5 Triangulasi peneliti: triangulasi peneliti adalah pengujian kredibilitas data dengan menggunakan lebih dari satu peneliti dengan memiliki gaya meneliti yang berbeda. (Firdaus and Zamzami 2018)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik keabsahan: 1)Triangulasi sumber, yang mana peneliti mencocokkan data dengan sumber data primer dan sekunder 2) Triangulasi teknik, peneliti melakukan kecocokan data dengan menggunakan bermacam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

